

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Desa dan Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 2

kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan¹²

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa terdiri dari:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintahan Desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h.1-2.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h. 12

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:¹⁴

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun

¹⁴ Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), h. 2.

dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/wali kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepala BPD.¹⁵

B. Efektivitas Kinerja

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia kinerja seorang karyawan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi kerja bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan. Landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. Jika tidak ada kinerja maka tujuan seluruh bagian organisasi tidak dapat tercapai.

Unit sumber daya manusia dalam suatu organisasi seharusnya berperan untuk menganalisis dan membantu memperbaiki masalah-masalah dalam pencapaian kinerja. Apa yang sesungguhnya menjadi peranan unit sumber daya manusia dalam suatu organisasi ini seharusnya tergantung pada apa yang diharapkan manajemen tingkat atas, seperti

¹⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h. 76

fungsi manajemen manapun, kegiatan manajemen sumber daya manusia harus dievaluasi dan direkayasa sedemikian sehingga mereka dapat memberikan kontribusi untuk kinerja yang kompetitif dari organisasi dan individu pada pekerjaan¹⁶

Pencapaian suatu tujuan atau target dari kebijakan (hasil guna) merupakan dasar efektivitas. Efektivitas merupakan relasi antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses dari kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas dan efisiensi pada keadaan keuangan dapat melihat sejauh mana mempergunakan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat atau efisien yang dilakukan secara tepat dan dapat memenuhi sasaran atau efektif serta hasil yang dicapai mempunyai rasionalitas terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada atau produktivitas.¹⁷ Menurut Lubis dan Martini Huseini dalam pengukuran efektivitas organisasi ada tiga pendekatan utama, sebagai berikut:¹⁸

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

¹⁶ Rose Siti Badriah, *Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol.4 No.3, 2017, hal.484.

¹⁷ Ichda Apriliana, dkk., *Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Periode 2016-2018*, Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram, Vol 1 No 1

¹⁸ Lubis dan Martini Husaini, *teori organisasi (suatu pendekatan makro)* ..., hal. 82.

- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

C. Peran Perangkat Desa

Peran menurut Soekanto adalah suatu kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas dan kewajiban yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan.

Perangkat Desa sebagai salah satu unsure pelaku Desa yang memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui Desa. Perangkat Desa merupakan bagian dari unsure Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan aparatur Desa dibawah nanungan Kepala Desa. Perangkat Desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis dan desentralisatis.¹⁹

¹⁹ Ita Wulandari dkk., *Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor* (Jurnal Akuntansi: Studi Pada Desa Hitam Putih), Vol.5 No.2

Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memandatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Maka dari itu kepemimpinan dan perang Perangkat Desa sangat mempengaruhi keberhasilan dan Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.²⁰

D. Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Istilah pengendalian internal berarti bahwa suatu tindakan yang diambil dalam organisasi yang digunakan untuk mengatur dan memberikan pengarahan kegiatan dalam organisasi tersebut. Pengendalian memastikan bahwa arahan dan kebijakan manajemen dilaksanakan secara semestinya, dikarenakan pengendalian internal yang baik merupakan factor kunci pengelolaan organisasi yang efektif.²¹

²⁰Dindin Abdullah Ghozali, *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Indonesia, 2015), hal.11-12

²¹ George H Bodnar, dkk., *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 9, hal.10

Menurut Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa: system pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.²²

2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan dari pengendalian internal dapat dipahami dari aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tujuan Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Tujuan operasional berkaitan dengan upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan didirikannya organisasi. Tujuan ini terkait dengan peningkatan kinerja keuangan, produktivitas, kualitas, pengamatan aset, dan likuiditas. Salah satu tujuan yang terkait dengan tujuan operasional adalah pengamanan aset. Organisasi dapat menentukan tujuan yang terkait dengan pencegahan atas

²² Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

kemungkinan terjadinya kehilangan set dan secara periodic mendekati serta melaporkan kejadian atas kehilangan asset.

b. Tujuan Keandalan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan/nonkeuangan serta pelaporan ekstern/intern untuk kepentingan manajemen dan pemangku kepentingan organisasi. Karakteristik dari laporan keuangan/nonkeuangan ekstern adalah disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan pihak ekstern, dipersiapkan sesuai dengan standar ekstern, dan untuk memenuhi persyaratan menurut regulator, kontrak, dan perjanjian. Sedangkan karakteristik laporan keuangan/nonkeuangan intern adalah digunakan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan kegiatan, dan ditetapkan oleh manajemen dan dewan pengawas organisasi.

c. Tujuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Secara internal, organisasi menyusun standar dan aturan yang diberlakukan dan mengikat bagi seluruh komponen organisasi. Di samping aturan internal, terdapat pula peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pihak eksternal dan harus dipatuhi oleh manajemen. Misalnya, dalam penyusunan laporan keuangan. Secara internal, penyusunan laporan keuangan didasarkan pada system akuntansi yang disusun secara internal. Secara eksternal,

terdapat standar akuntansi pemerintahan yang wajib dipatuhi oleh organisasi dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan kepatuhan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan laporan keuangan agar mendapatkan penilaian yang wajar dari pihak auditor eksternal.²³

E. Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.²⁴

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan Pemerintahan Pusat dan bantuan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBN.²⁵

Berikut pendapatan desa berdasarkan sumbernya:²⁶

a. Pendapatan Desa

²³ Wahyudi, *Soft Controls Aspek Humanisme Dalam Sistem Pengendalian Internal*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hal. 18-19.

²⁴ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa

²⁵ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hal.81-83

²⁶ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, hal.40-41

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu kembali oleh desa. Pendapatan Asli Desa:

- 1) Hasil usaha desa, contohnya dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- 2) Hasil kekayaan desa, contohnya tanah kas desa, bangunan desa, dll
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, contohnya urunan desa, iuran penitipan kendaraan, dll.
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa, contohnya ganti ongkos cetak surat, biaya legalisasi surat, dan sewa tanah desa.

b. Transfer

- 1) Dana desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dari belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah/Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagi hasil Pajak Daerah/Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah. Misalnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk desa.
- 4) Bantuan keuangan APBD Pem.Proc, Kabupaten/Kota.

c. Kelompok pendapatan lain-lain

- 1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- 2) Sumbangan pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dll
- 3) Lain-lain pendapatan desa yang sah, contohnya hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

F. *Good Government Governance*

Kajian *Good governance* dalam lingkup hukum administrasi ada menyangkut tiga hal yaitu *Good governance* dapat dipadankan dengan fungsi mengendalikan kehidupan masyarakat, memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian perlindungan hukum bagi masyarakat. Istilah *Good Government Governance* berasal dari bahasa latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa inggris menjadi *govern*, yang berarti (menyetir, mengendalikan). *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

Berdasarkan teori *Good Government Governance* diatas dan juga sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *Good Government Governance* sebagai pengelolaan

pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *agen of change*.²⁷

G. Pengelolaan Laporan Keuangan Desa

Pengelolaan Laporan Keuangan Desa sangat erat hubungannya dengan Proses Perencanaan APBDes. Perencanaan APBDes atau pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Penjelasan UU No.6 tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana

²⁷ Ardin Dolok, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*, (Jurnal Media Studi Ekonomi, 2017), Vol. 20 No. 1.

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, RPJMDesa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu enam tahun, yang mana rancangan ini memuat visi dan misi dari kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁸

Ardi hamzah menyatakan bahwa RPJMDesa bertujuan untuk:²⁹

- a) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b) Menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai Permendagri No. 114 tahun 2014 kepala desa yang menyelenggarakan penyusunan RPJMDesa wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan dilaksanakan

²⁸ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

²⁹ Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, Dan Partisipatoris*, (Surabaya: Pustaka, 2015).

dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program, dan kegiatan kabupaten/kota.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Berdasarkan Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, RKPDesa merupakan menjabarkan dari RPJMDesa untuk rencana kerja satu tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan mau, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditentup dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMDesa.³⁰

Permendagri No. 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa RKPDesa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKPDesa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

³⁰ Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa

APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila perkiraan akan terjadi deficit datau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa periode sebelumnya.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal yang seringkali menjadi pusat perhatian banyak orang, terlebih pada pengelolaan uang public. Disitulah peran dari Lembaga legislative dalam hal ini BPD diperlukan untuk melihat setiap aliran dana yang akan digunakan yang tertuang dalam RAPERDes/APBDes harus dapat dicermati sebaik mungkin. Agar penggunaan uang tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisiensi dan ekonomi dan terhindar dari adanya indikasi korupsi. Mardiasmo menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan, prinsip akuntabilitas dan prinsip *value for money*.³¹

³¹ Subroto, *Pengelolaan Keuangan Desa...*, hl. 105

H. Penelitian Terdahulu

1. Dari penelitian yang ditulis oleh Siti Istiqomah dengan tujuan untuk menjelaskan efektivitas kinerja badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Metode yang dipakai di penulisan ini adalah tipe penelitian evaluative dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan dari sumber yang lain. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari ketiga fungsinya baik itu legislative, anggaran dan pengawasan yang masih kurang. Sehingga pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal kurang akuntabel. Hal tersebut dikarenakan meskipun perencanaan ADD sudah melibatkan semua pihak serta pertanggungjawaban pelaporan sudah dilakukan dengan baik namun penggunaan ADD untuk kegiatan operasional pemerintahan desa melebihi 30%. Selain itu penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat kurang fokus pada keberdayaan usaha/ekonomi masyarakat desa sehingga manfaat dari ADD hanya sekedar jangka pendek atau untuk pembiayaan rutin dan pembangunan fasilitas fisik saja. Sehingga pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal masih terjadi penyimpangan/kebocoran pada penggunaan ADD, program-program yang dibuat dari penggunaan ADD juga kurang sesuai dengan prioritas dan kesejahteraan masyarakat kurang

terwujud. Kemudian mengenai efektivitas kinerja, penyusunan program sesuai prioritas dapat dilaksanakan dengan mengefektifkan kinerja dari BPD pada saat proses perumusan atau perencanaan mengenai arah penggunaan ADD.

2. Dari penelitian yang ditulis oleh Wahyu Subandi dengan tujuan mengetahui dan menganalisis: 1). Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di lokasi penelitian, 2). Faktor-faktor yang menghambat kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan instrument utama yaitu dengan informan kunci seperti kepala desa, kaur pemerintahan dan masyarakat untuk pembuatan hasil dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat dikatakan berjalan dengan baik dan faktor yang menghambat kinerja yaitu kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan computer serta kurangnya motivasi dari diri aparat desa untuk mencapai tujuan kerja. Saran untuk pelaksanaan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa beserta aparat desa perlu melakukan fungsi kerja dan tugasnya secara maksimal agar lebih baik dalam melayani masyarakatnya dan perlu adanya pembelajaran atau kursus untuk aparat desa yang belum mahir menggunakan computer.

3. Dari penelitian yang ditulis oleh Gairah Laia dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yakni berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema, gambar dan bukan angkat-angka berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa kinerja pemerintahan dalam mengelola ADD dan DD sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responabilitas dan akuntabilitas.
4. Dari penelitian yang ditulis oleh Nova Sulastri ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan kepala desa, sebagaimana argumentasi awal dalam penelitian ini bahwa perangkat desa dan kepala desa merupakan basis pelayanan masyarakat terendah. Tinggi rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan bukan hanya tergantung pada kinerja para perangkat desa saja selaku bawahan, tetapi juga pemimpinnya. Kepemimpinan seseorang akan menentukan maju atau mundurnya dan hidup atau mati organisasi yang dipimpinnya. Pemerintah desa seperti halnya pemerintah pusat dan daerah, dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan mampu menjawab tuntutan yang makin tinggi dari masyarakat, baik dari kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Mengingat pentingnya

kepemimpinan sebagai faktor penentu dalam sukses atau suatu organisasi dan usaha, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan produktivitas kinerja aparatur desa. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan Teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menerapkannya, seperti pendekatan demokratis. Dengan adanya pendekatan tersebut memudahkan pemimpin dalam mengembangkan tanggung jawab seperti melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan, namun tidak hanya itu, ada juga pendekatan kepemimpinan yang lain seperti *laissez faire (free reign)* dan karismatik. Kemudian diperkuat dengan adanya beberapa faktor seperti *personal factor, team factor dan leadership factor*, dan yang paling dominan dari ketiga faktor tersebut adalah *leadership factor* karena dengan adanya pemimpin maka ada yang memberi dorongan, masukan dan bimbingan kepada bawahan atau pegawai dalam bekerja.

5. Dari penelitian yang ditulis oleh Retno Wulandari dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Sistem Pengendalian Internal, Kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggungjawaban dan Upaya dalam menanggulangi Kendala yang

ada di dalam mekanisme pertanggungjawaban APBDesa pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) sudah dilakukan dengan baik. Sedangkan untuk Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sudah baik. Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat memudahkan perangkat desa dalam mengerjakan laporan keuangan desa. Adapun kendala yang dihadapi Desa Junwangi yaitu keterlambatan pencairan dana, sumber daya manusia, dan peran masyarakat.

6. Dari penelitian yang ditulis oleh Sri Rahmany dan Fatimah dengan tujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang transparan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten bengkalis ditinjau menurut perspektif islam. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat meminimalisir terjadinya

kecurangan/kesalahan baik dalam pencatatan maupun penyajian laporan keuangan yang dibuktikan dengan adanya pemantauan terhadap pencatatan akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa sesuai dengan yang diinginkan dan bisa dipertanggungjawabkan.

7. Dari penelitian yang ditulis oleh Ely Ayuning Astuty dengan tujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur, system pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Muntilan. Teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu populasi yang memenuhi criteria sampel sesuai dengan yang diperoleh. Hasil penelitian membuktikan bahwa system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8. Dari penelitian yang ditulis oleh Desi Nurmala sari bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan dan bagaimana Analisis Sistyem Pengendalian Internal Pemerintahan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara teori dengan praktik yang diterapkan di Desa Dadapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dadapan antara teori dengan praktik yang diterapkan dalam mengelola dana desa belum sepenuhnya menerapkan SPIP karena kurangnya

pengetahuan perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan, hal tersebut dapat menyebabkan LPJ untuk dana desa disampaikan dengan terlambat.

Dalam beberapa penelitian terdahulu di atas, banyak penelitian yang mengkaji tentang efektivitas kinerja perangkat desa dan sistem pengendalian internal, namun masing-masing tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik dari penyebab terjadinya kolaborasi siapa dan mana saja yang terlibat, tahapan-tahapan yang dilalui, dan hambatan-hambatan yang ditemuinya. Selain itu, fokus masalah yang dikaji yakni terkait dengan efektivitas kinerja perangkat desa dan sistem pengendalian internal belum banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu.

I. Kerangka Konseptual

